



JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)

P- ISSN: 2301-4717 E-ISSN: 2716-022X
 Homepage: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index>



Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi: Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi

Anggun Iga Yuditiya¹, Sri Rahayu^{2*}, Wiwik Tiswiyanti³

¹²³ Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding author: sri_rahayu@unja.ac.id | Phone Number: 085279027135

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.12253>

ARTICLE INFO

Received: 28-07-2023

Received in revised: 03-08-2023

Accepted: 25-08-2023

Available online: 18-09-2023

KEYWORDS

LKPD, SDM, TI, SPI,
 Commitment

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence regarding the influence of human resource competence, utilization of information technology, and internal control systems on the quality of local government financial reports with organizational commitment as a moderating variable. Source of data in this study is primary data with a questionnaire. The number of respondents was 67 people. Hypothesis testing uses moderate regression analysis with the help of the SPSS version 23 program. The results show that human resource competence, information technology utilization, and internal control systems have an effect on the quality of the Jambi City government's financial reports. Organizational commitment moderates the influence of human resource competence on the quality of local government financial reports. However, organizational commitment is not able to moderate the relationship between the use of information technology and the government's internal control system on the quality of local government financial reports

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang berkualitas memerlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai peraturan pelaporan keuangan daerah (Defitri, 2018). Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No.71 Tahun 2010 sebagai prosedur pelaporan keuangan yang memiliki manfaat umpan balik, informasi disajikan secara jujur, informasi keuangan pada periode masa lalu dapat dibandingkan dengan masa kini, dan disajikan dengan batas pemahaman pengguna. Opini audit yang diberikan oleh auditor eksternal dalam hal ini merupakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintahan daerah mencerminkan kualitas laporan keuangan pada instansi pemerintahan.

Kinerja pemerintah daerah dapat tercermin melalui kualitas laporan keuangan yang relevan dan andal (Swastika & Widhiyani, 2020). Pengguna keputusan membutuhkan laporan keuangan yang transparansi, dapat dipertanggungjawabkan, netralitas, laporan keuangan pada peristiwa masa lalu dapat dibandingkan dengan masa kini, serta bahasa yang mudah dipahami untuk menghindari kesalahan dalam administrasi, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan laporan keuangan (Trisnawati & Wiratmaja, 2018).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setiap tahunnya selalu memberi penilaian opini atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya pada laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Opini audit yang diterima oleh Pemerintah Kota Jambi berupa opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penetapan opini WTP oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota

Jambi merupakan kali keenam selama 6 (enam) tahun berturut-turut sejak tahun 2016 lalu. Penerimaan opini tersebut memberikan makna bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi telah memenuhi syarat kualitatif laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berhasilnya Pemerintah Kota Jambi dalam mempertahankan pendapat atau opini BPK merupakan wujud komitmen yang tinggi Kepala Perangkat Daerah dalam memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Diraihnya opini audit WTP oleh Pemkot Jambi tidak menjaminkannya suatu laporan keuangan terbebas dari temuan atas permasalahan kelemahan efektivitas pengendalian intern dan/ataupun ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan. BPK memberikan rekomendasi agar dapat meningkatkan kinerja Pemkot Jambi dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi (Hidayakh et al., 2020).

Temuan kelemahan oleh BPK sebagai akibat terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan suatu upaya untuk memperbaiki kelemahan tersebut (Sougi et al., 2018). Upaya tersebut adalah dengan memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (S. Rahayu et al., 2020). Temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebagai akibat kurang cermatnya para pejabat dalam bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan perencanaan, lemahnya pengawasan serta pengendalian yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan. Temuan pada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah kurang baik dan akuntabilitas juga kurang baik (Atmaja & Probahudono, 2015). Temuan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan oleh BPK dalam memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan pemerintah daerah atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Temuan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2021 diantaranya permasalahan pemanfaatan aset tetap oleh pihak lain tidak memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Kota Jambi yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi daerah dari pemanfaatan kekayaan daerah oleh pihak lain minimal sebesar Rp599,31 Juta, pembayaran belanja honorarium pada 3 (tiga) organisasi perangkat daerah tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan terjadinya pembayaran belanja honorarium yang membebani keuangan daerah sebesar Rp695,27 Juta, dan kekurangan volume pada 16 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebesar Rp2,73 Miliar yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian pekerjaan (Siaran pers BPK, 2021). Namun, atas kelemahan yang ditemukan BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi juga turut sukses meraih penghargaan Pencapaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Jambi mendapatkan apresiasi khusus berupa penghargaan dan penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) oleh Menteri Keuangan RI (Jambi.antaranews.com, 2021).

Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi keberlangsungan suatu organisasi pemerintah. Kinerja instansi pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas dan kompetensi pegawai karena tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya sehingga diperlukan manajemen pegawai negeri sipil yang efektif (Halim, 2010). Kompetensi pengetahuan dan keterampilan pada Pegawai relatif mudah dikembangkan, seperti ikut serta pada program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (Rohida, 2018). Peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai pada bidang pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu berkembang sesuai perkembangan zaman saat ini yang berada pada revolusi industri 4.0 (Basri & Johannes, 2022).

Perkembangan teknologi informasi yang selalu diperbarui bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi instansi pemerintahan dalam memproses laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan informasi keuangan yang transparansi dan andal kepada pengguna keputusan (Satriawan & Dewi, 2020). Pesatnya perkembangan teknologi menuntut perangkat daerah untuk mampu menggali segala kompetensi pegawai dan memiliki potensi dalam menunjang kinerja (Rohida, 2018).

Laporan keuangan dapat dicapai apabila penyusunan telah sesuai pedoman dengan merujuk pada SPIP. Instansi membutuhkan pegawai dan sistem informasi guna mencapai tujuan organisasi dalam mengarahkan, mengawasi serta mengukur kompetensi pegawai dengan dukungan pengendalian internal (Omposunggu & Salomo, 2019).

Instansi membutuhkan pegawai yang berkompeten untuk menjaga dan memelihara fungsi instansi melalui komitmen yang tinggi pada diri individu. Untuk mencapai fungsi dan tujuan instansi pemerintahan daerah sangat diperlukannya komitmen organisasi yang tinggi pada diri pegawai. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan nilai-nilai instansi, adanya keinginan untuk berafiliasi pada instansi dan bersedia bekerja (Siregar et al., 2021).

Komitmen organisasi merupakan sikap atau perilaku individu terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, nilai dan tujuan organisasi, serta adanya kemauan untuk mengerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas. Komitmen organisasi diharapkan memiliki hubungan kekuatan relatif yang luas antara individu dengan organisasi untuk mencapai tujuan instansi pemerintahan (Astika & Yasa, 2018). Komitmen pada diri setiap Aparatur Sipil Negara terhadap organisasi merupakan usaha nyata yang dilaksanakan untuk mencapai target pemerintah daerah dalam melaksanakan pelaporan keuangan dengan tingkat transparansi yang tinggi (Halmawati & Mustin, 2015). Tahap perencanaan hingga tahap pelaporan merupakan salah satu proses melakukan pengawasan yang efektif sebagai bentuk komitmen yang kuat oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang positif terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud peningkatan kinerja pemerintah daerah (Hului et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana komitmen organisasi memoderasi pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan TI, dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Jambi

TINJAUAN PUSTAKA

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 menjelaskan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap (perilaku) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam organisasi sebagai subjek pelaksana kebijakan dan pelaksana kegiatan operasional organisasi (Setiadiputra, 2017). Tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten, Pemerintah Daerah mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas di lingkungan kerjanya. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas bagi pemerintah adalah dengan mempersiapkan sumber daya aparatur pemerintah yang mampu berfikir logis, rasional, dan mampu melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi pada pemerintahan dengan baik (Hului et al., 2023). Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan keuangan akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas dalam hal pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan tepat waktu dan andal (Goo et al., 2019). Kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil relatif mudah untuk dikembangkan, seperti melalui program Pendidikan dan Pelatihan, turut serta aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi/seminar/workshop dari lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (Hului et al., 2023). Untuk meningkatkan kompetensi pegawai diperlukan suatu penempatan pegawai yang tepat untuk mengisi pekerjaan dalam organisasi. Penempatan pegawai diharapkan mampu memberikan kontribusi yang memadai bagi organisasi. Kesesuaian penempatan pegawai pada tingkat pendidikan dan bidang akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang bersangkutan (Zulfahmi et al., 2020).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi yang semakin maju pesat dengan pemanfaatan yang semakin luas membuka peluang untuk mengakses, mengelola, mendayagunakan informasi untuk mendorong pemerintah daerah yang bersih, transparan, dan menyalurkan informasi keuangan secara cepat dan tepat. Perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih tentunya bisa memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam mempercepat proses pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan kepada pengguna (Satriawan & Dewi, 2020). Pemanfaatan teknologi yang memiliki keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan waktu proses pengolahan data maka akan mengurangi kesalahan yang terjadi, serta mampu meminimalisir terjadinya kecurangan. Tersedianya komputer sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menjadikan proses pengelolaan keuangan daerah mudah dan cepat. Pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi komputer akuntansi merupakan kebutuhan penting bagi aparatur pemerintah daerah untuk membantu dalam melakukan pengelolaan keuangan SKPD dan PPKD yang tentunya berpacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (A. U. Putri & Djuita, 2021).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar informasi laporan keuangan reliabel (Rahmawati et al., 2018). Pengendalian internal yang efektif dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah sehingga informasi yang disajikan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Alminanda & Marfuah, 2018). Unsur sistem pengendalian intern merupakan dasar penyelenggaraan dan sebagai tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal (Sihite & Holiawati, 2017). Dalam menerapkan unsur sistem pengendalian intern, pimpinan instansi pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detil untuk menyesuaikan dengan kegiatan instansi pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah (PP No.60 Tahun 2008).

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi pada Penelitian Meyer dan Allen (1984) dianggap sebagai konsep yang multidimensional dengan melihat sebagai dua dimensi yaitu komitmen afektif yang berkaitan dengan emosional pegawai, komitmen berkelanjutan yang berkaitan dengan keinginan untuk meningkatkan pekerjaannya. Komitmen organisasi pada diri pegawai merupakan komitmen yang diciptakan dan dikembangkan oleh individu yang bekerja dalam suatu organisasi serta diterima sebagai nilai, visi, dan misi setiap pegawai (Goo et al., 2019). Komitmen organisasi diharapkan memiliki hubungan kekuatan relatif yang luas antara individu dengan organisasi untuk mencapai tujuan instansi pemerintahan (Astika & Yasa, 2018). Pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel merupakan keinginan setiap kepala daerah, tentunya membutuhkan komitmen organisasi dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah daerah. Komitmen pada diri setiap Aparatur Sipil Negara terhadap organisasi merupakan usaha nyata yang dilaksanakan untuk mencapai target pemerintah daerah dalam melaksanakan pelaporan keuangan dengan tingkat transparansi yang tinggi (Halmawati & Mustin, 2015). Aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi, sehingga akan tercipta laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan tingkat transparansi yang tinggi serta penggunaan dana masyarakat terbebas dari kecurangan maupun penyelewengan dan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif yang menyajikan data dengan angka-angka untuk menggambarkan keadaan masa sekarang secara mendalam dari berbagai karakteristik data. Populasi pada penelitian adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pelaporan keuangan daerah yaitu Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Pegawai Penatausahaan Keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan tipe *purposive sampling* berdasarkan *judgment sampling* untuk mendapatkan informasi berdasarkan kriteria tertentu. Sumber data merupakan data primer melalui pengisian kuesioner oleh responden. Teknik skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala diferensial semantik yang menilai jawaban responden pada rating skala bipolar dalam 7 (tujuh) titik garis kontinum. Metode yang digunakan adalah *moderated regression analysis* (MRA) yang merupakan suatu aplikasi khusus regresi berganda dimana dalam persamaan regresi tersebut mengandung unsur interaksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dengan melihat nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Laporan Keuangan (Y)	67	36	49	42,78	2,768
Kompetensi SDM (X1)	67	51	68	59,93	3,909
Teknologi (X2)	67	33	42	37,64	2,200

Pengendalian Intern (X3)	67	53	69	61,13	3,984
Komitmen (Z)	67	39	56	47,87	4,026
Valid N (listwise)	67				

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 1 membuktikan bahwa secara keseluruhan nilai rata-rata variabel penelitian lebih tinggi dari standar deviasi. Hal ini membuktikan model penelitian layak digunakan.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji reliabilitas data bertujuan untuk mengukur konsisten atau tidaknya suatu jawaban kuesioner yang diberikan kepada responden. Hasil uji reliabilitas data menggunakan *Cronbach Alpha*. Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu jawaban kuesioner. Hasil uji validitas menggunakan *pearson correlation*. Hasil uji kualitas data ditampilkan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	Alpha	Keterangan	R hitung	R tabel	Keterangan
LKPD (Y)	0,854	0,60	reliabel	0,577 – 0,629	0,240	Valid
SDM (X1)	0,800	0,60	reliabel	0,557 – 0,463	0,240	Valid
Teknologi (X2)	0,722	0,60	reliabel	0,405 – 0,329	0,240	Valid
SPI (X3)	0,861	0,60	reliabel	0,724 – 0,723	0,240	Valid
Komitmen (Z)	0,839	0,60	reliabel	0,478 – 0,599	0,240	Valid

Sumber: Data Diolah (2023)

Merujuk pada tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai perhitungan Cronbach Alpha > 0,60. Artinya, seluruh variabel penelitian adalah reliabel (Ghozali, 2016). Hasil perhitungan validitas seluruh pernyataan variabel memiliki nilai diatas kriteria 0,240 (r tabel). Maka butir-butir pernyataan variabel penelitian adalah layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	5,108	4,159			1,228	,224
Kompetensi	,492	,073		,695	6,781	,000
Teknologi	,550	,144		,437	3,821	,000
Pengendalian	-,205	,090		-,295	-2,268	,027

a. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Data Diolah (2023)

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji F

Hasil uji F pada variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	306,072	3	102,024	32,207	,000 ^b
	Residual	199,570	63	3,168		
	Total	505,642	66			

a. Dependent Variable: LKPD

b. Predictors: (Constant), Pengendalian, Kompetensi, Teknologi

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat

ukur untuk berkomunikasi antara data keuangan atau kegiatan organisasi. Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas, maka diperlukan seorang pegawai yang berkompeten dalam bidang akuntansi. Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu instansi tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Pegawai Negeri Sipil juga memiliki kewajiban mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah. Teknologi informasi yang canggih tidak akan memiliki banyak makna tanpa diimbangi dengan pegawai yang mampu mengoperasikan teknologi dengan baik serta adanya penyelenggaraan sistem pengendalian intern untuk melakukan pengawasan dan peningkatan peran pegawai dalam organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada tabel 4 diketahui nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya, model penelitian yang digunakan memenuhi uji kelayakan model. Sehingga **H₁ diterima** yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena adanya kompetensi pegawai yang semakin tinggi didukung dengan pemberian pelatihan secara rutin pada pegawai di lingkungan instansi Pemerintah Kota Jambi, pemerintah daerah juga turut serta melakukan kualifikasi yang sesuai bidang kerja dengan berdasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai, pengetahuan yang dimiliki pegawai serta keterampilan pegawai Pemkot Jambi, pemanfaatan teknologi informasi pada masing-masing unit kerja yang tepat guna, sistem informasi yang telah terkomputerisasi sesuai peraturan, serta didukung pemantauan dan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tinggi rendahnya suatu kompetensi setiap pegawai negeri sipil dalam bidangnya akan berpengaruh terhadap kinerja dan kontribusi dalam penyusunan laporan keuangan (Satriawan & Dewi, 2020). Bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas diharuskan mempersiapkan sumber daya aparatur pemerintah yang mampu berpikir logis, rasional, dan dapat melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi pada pemerintahan dengan baik (Hului et al., 2023). Hasil uji statistik pada hipotesis kedua memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kompetensi SDM membuktikan hasil berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka hipotesis kedua (H₂) **diterima**. Instansi pemerintahan membutuhkan pegawai berkompeten untuk mempertahankan opini WTP yang diberikan oleh BPK dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang terbebas dari kesalahan material.

Instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah membutuhkan pegawai yang kompeten, dengan berlatar pendidikan akuntansi, mengikuti program diklat, aktif dalam kegiatan seminar/workshop ataupun kegiatan bimbingan secara teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi (A. M. Putri et al., 2018). Salah satu poin penting berjalannya suatu instansi sebagai penggerak organisasi, dilihat dari sumber daya manusia yang berkompeten (Satriawan & Dewi, 2020, Saputra et al., 2020, Ramadhani et al., 2018). Untuk meningkatkan kompetensi pegawai yang terampil dan andal diperlukan suatu penempatan yang tepat untuk mengisi pekerjaan dalam instansi pemerintahan. Kesesuaian penempatan pegawai yang sesuai tingkat pendidikan dan disiplin ilmu akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang bersangkutan (Zulfahmi et al., 2020).

Kompetensi pada pegawai Pemerintah Kota Jambi secara pengetahuan telah melaksanakan penerapan tugas berdasarkan deskripsi tugas yang sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya. Pegawai mampu bekerja secara berkelompok dengan menjalin hubungan dan komunikasi dalam mencapai tujuan instansi. Latar belakang pendidikan akuntansi pegawai pada Pemerintah Kota Jambi menunjukkan mayoritas berpendidikan S1. Penyusunan formasi pegawai telah sesuai pada tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mayoritas pegawai pada bidang disiplin ilmu akuntansi. Dengan didukung pendidikan dalam disiplin ilmu akuntansi yang memadai, pegawai akan mengerti dan memahami pekerjaan yang dilakukan, sehingga akan sangat membantu dalam membuat laporan keuangan (Meliani et al., 2022).

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih tentunya bisa memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam mempercepat proses pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi mengenai laporan keuangan kepada pengguna (Satriawan & Dewi, 2020). Hasil uji statistik pada hipotesis ketiga memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Pemanfaatan teknologi informasi membuktikan hasil berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H₃ **diterima**. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam menyediakan informasi untuk

pengambilan keputusan yang bermanfaat dan efektif.

Pemanfaatan teknologi yang memiliki keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan waktu proses pengolahan data maka akan mengurangi kesalahan yang terjadi, serta mampu meminimalisir terjadinya kecurangan. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi salah satunya dengan penggunaan komputer. Penggunaan komputer bertujuan untuk membantu pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pegawai mampu untuk mengakses data lebih cepat dan tepat (Marlina *et al.*, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi yang baik didukung dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan (Efendi *et al.*, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi pada aplikasi komputer akuntansi merupakan kebutuhan penting bagi aparatur pemerintah daerah untuk membantu dalam melakukan pengelolaan keuangan SKPD dan PPKD yang tentunya berpacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (A. U. Putri & Djuita, 2021).

Pengelolaan keuangan Pemkot Jambi telah terkomputerisasi sejak awal. Penggunaan teknologi informasi pada Pemerintah Kota Jambi telah sesuai dengan standar sehingga mampu memberikan pengaruh yang baik pada laporan keuangan. Pegawai Pemerintah Kota Jambi juga telah memanfaatkan jaringan internet yang tersedia pada setiap unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi oleh pegawai Pemerintah Kota Jambi telah sesuai dengan standar serta didukung dengan sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola laporan keuangan dapat membantu meminimalisir terjadinya kesalahan dan laporan keuangan yang disajikan tepat waktu (Meliani *et al.*, 2022).

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern memiliki fungsi dalam memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi proses akuntansi dalam menciptakan keandalan pelaporan keuangan. Dalam menerapkan unsur sistem pengendalian intern, pimpinan instansi pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detil untuk menyesuaikan dengan kegiatan instansi pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah (PP No.60 Tahun 2008). Hasil uji statistik pada hipotesis ketiga memiliki nilai signifikansi $0,027 < 0,05$. Sistem pengendalian intern membuktikan hasil berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H_4 **diterima**. Sistem pengendalian intern memiliki peran penting terhadap instansi sebagai bentuk pengawasan kepada pegawai serta mampu mengatasi permasalahan yang timbul secara cepat dan meningkatkan peran pegawai dalam organisasi.

Sistem pengendalian intern sangat berpengaruh terhadap organisasi untuk melaksanakan pengawasan dan peningkatan peran pegawai di lingkungan instansi pemerintahan daerah (Putra *et al.*, 2021). Syarat dari informasi yang andal dan relevan adalah perekaman yang cepat serta klasifikasi transaksi dan peristiwa yang tepat. Komunikasi yang tepat turut serta terjadi di semua arah, mengalir ke bawah, melintasi dan ke atas organisasi (Omposunggu & Salomo, 2019). Informasi yang dilaporkan juga merujuk kepada hasil pemantauan terhadap proses penilaian kinerja sistem pengendalian intern dengan memberikan keyakinan bahwa temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi akan memperbaiki permasalahan dan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi bertujuan untuk mengurangi temuan yang berulang sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan pemeriksa dalam memberikan opini audit, sehingga penerimaan opini audit akan semakin tinggi pula.

Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi

Hasil uji hipotesis komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Kompetensi_Komitmen	,047	,018	6,088	2,558	,013
Teknologi_Komitmen	-,052	,041	-4,258	-1,258	,213
Pengendalian_Komitmen	-,005	,020	-,780	-,274	,785

a. Dependent Variable: LKPD

Sumber: Data Diolah (2023)

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia yang memiliki komitmen yang tinggi akan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas kinerja serta memberikan kemampuan secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi dapat tercipta apabila pimpinan instansi mampu memberikan dorongan, dukungan kepada setiap sumber daya manusia di dalam instansi pemerintahan, serta pemberian reward bagi sumber daya manusia yang berprestasi serta memberikan apresiasi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Hasil uji statistik pada hipotesis kelima memiliki nilai signifikansi $0,013 < 0,05$. Komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H_5 **diterima**. Tingginya komitmen yang dimiliki oleh pegawai terhadap fungsi instansi akan memberikan kemampuan secara maksimal dan terus meningkatkan kualitas kinerja.

Organisasi turut serta memberikan dukungan dan memberdayakan setiap anggota di dalam organisasi untuk meningkatkan komitmen dalam diri masing-masing individu terhadap organisasi. Tingginya komitmen organisasi pada diri individu akan menciptakan rasa loyal pada organisasi atau instansi (Marsontio et al., 2022). Loyalitas dan tanggung jawab tinggi yang dimiliki oleh pegawai mampu mendukung kompetensi pegawai dalam bekerja serta penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sesuai standar yang berlaku (Andelina, 2017). Komitmen yang tinggi pada diri pegawai Pemerintah Kota Jambi mampu mendorong pegawai untuk memberikan loyalitas yang baik kepada instansi. Loyalitas yang diberikan menunjukkan pegawai memiliki rasa bangga terhadap instansi. Sikap loyal pegawai Pemerintah Kota Jambi ditunjukkan dengan sikap membina hubungan baik dengan sesama rekan kerja, pegawai dengan pimpinan, ataupun dengan pihak instansi lain. Pegawai Pemerintah Kota Jambi dituntut agar dapat meningkatkan loyalitas dan selalu berpikir positif sebagai upaya mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dengan tingkat transparansi yang tinggi.

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin tinggi dalam penyajian laporan keuangan maka akan meminimalkan kesalahan dalam penginputan dan penyajian data. Hasil uji statistik pada hipotesis keenam memiliki nilai signifikansi sebesar $0,213 > 0,05$. Komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H_6 **ditolak**. Tinggi rendahnya komitmen yang dimiliki pada setiap individu dalam mengoperasikan teknologi bergantung kepada kemauan masing-masing individu.

Teknologi merupakan sistem yang menjalankan suatu proses pengelolaan, sementara komitmen berkaitan dengan keinginan pada diri setiap individu, hal ini tentunya berdampak pada ada atau tidaknya keinginan pada masing-masing individu dalam mengoperasikannya (Putra et al., 2021). Teknologi informasi yang telah terkomputerisasi sejak awal transaksi namun terkendala oleh gangguan jaringan internet yang tidak lancar pada instansi akan menyebabkan terhambatnya proses pengelolaan laporan keuangan. Kendala yang dialami tersebut dapat berdampak terhadap fungsi akuntansi yang seharusnya dijalankan. Minimnya fasilitas yang didapatkan akan berdampak pada rasa tidak semangat dalam menjalankan aktivitas. Jika hal ini terus dibiarkan akan menyebabkan terhambatnya pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern akan berjalan semakin efektif dan efisien apabila didukung dengan komitmen organisasi pada diri setiap individu. Hasil uji statistik pada hipotesis ketujuh memiliki nilai signifikansi sebesar $0,785 > 0,05$. Komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H_7 **ditolak**. Rendahnya komitmen yang dimiliki oleh pimpinan instansi dan seluruh pegawai instansi pemerintahan, maka sistem pengendalian intern yang ditetapkan hanya merupakan sebatas aturan yang dibuat tanpa memiliki nilai (Putra et al., 2021).

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dasar yang menggambarkan keseluruhan sistem pengendalian intern di lingkungan instansi Pemerintah Kota Jambi. Pimpinan instansi harus memperhatikan komitmen pegawai dalam menunjang pelatihan secara teknis untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Pelatihan secara teknis yang dilaksanakan pada lingkungan instansi pemerintah bertujuan agar setiap pegawai mendapatkan pelatihan sesuai bidang kerja untuk meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dalam bekerja. Apabila komitmen terhadap kompetensi terkait pemberian pelatihan kepada pegawai juga selalu konsisten maka dapat meningkatkan kinerja pegawai. Pelatihan yang diikuti oleh pegawai bagian keuangan akan dapat membantu pegawai memproses serta mengolah data akuntansi menjadi lebih tepat dan akurat. Rendahnya keterlibatan pegawai dalam kegiatan instansi juga menjadi faktor pemicu lemahnya efektifitas sistem pengendalian intern yang dilaksanakan. Komitmen yang rendah pada diri pegawai dapat menyebabkan rendahnya dorongan motivasi pegawai terhadap pencapaian tujuan instansi. Hal ini nantinya dapat menyebabkan pegawai lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kemajuan instansi Pemerintah Kota Jambi.

KESIMPULAN

Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi didukung dengan pegawai yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan penyusunan formasi pegawai di lingkungan instansi Pemerintah Kota Jambi telah disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Sehingga mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang sejak awal transaksi hingga akhir penyusunan laporan keuangan telah terkomputerisasi. Hal ini tidak terlepas dari informasi yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai dengan menjalin komunikasi diantara sesama rekan kerja dan pegawai dengan pimpinan instansi.

Komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pegawai terhadap instansi pemerintah yang akan menyebabkan rasa ikut memiliki secara emosional dan merasa terikat dengan instansi, sehingga nantinya pekerjaan yang dilakukan akan selalu mengarah kepada pencapaian tujuan instansi.

Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tinggi rendahnya komitmen yang dimiliki pada setiap individu dalam mengoperasikan teknologi bergantung kepada kemauan masing-masing individu. Rendahnya keterlibatan pegawai dalam kegiatan instansi juga menjadi faktor pemicu lemahnya efektifitas sistem pengendalian intern yang dilaksanakan. Komitmen yang rendah pada diri pegawai dapat menyebabkan rendahnya dorongan motivasi pegawai terhadap pencapaian tujuan instansi. Hal ini nantinya dapat menyebabkan pegawai lebih mengedepankan kepentingan pribadi daripada kemajuan instansi Pemerintah Kota Jambi.

Pemerintah Daerah Kota Jambi diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan penggunaan teknologi informasi dan menerapkan sistem pengendalian intern sesuai pedoman serta perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya dari pengetahuan, namun pelaksanaan diklat pra jabatan bagi calon pegawai dan diklat dalam jabatan untuk dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman pegawai dalam menyelesaikan tugas pekerjaan. Pimpinan instansi dan seluruh pegawai Pemerintah Kota Jambi untuk dapat terus meningkatkan komitmen organisasi sebagai wujud dalam penyelenggaraan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dan tingkat transparansi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andelina, M. W. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 8(2), 132-153.
- Basri, W. S., & Johannes, A. W. (2022). Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Penerapan Pelatihan Nonklasikal Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 36-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1>
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *jurnal Benefita*, 64-75.
- Efendi, L., Darwanis, & Abdullah, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2).
- Evi, H., Rahayu, S., & Gowon, M. (2020). Determinan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris di Pemerintah Ddaerah Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*, 5(2), 80-89

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (edisi 8).
- Halim, A. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (edisi pert). UPP STIM YKPN.
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Putri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 11(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- Marsontio, O., Basri, Y. M., & Ratnawaty, V. (2022). Keterlambatan Penyerapan Anggaran: Peran Komitmen Organisasi Sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 12(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3505>
- Meliani, P., Nyoman, D., & Werastuti, S. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(1), 33–43.
- Ompusunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 78–86.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Proceeding Seminar Nasional*.
- Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Binangkit, I. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 8(2).
- Ramadhani, M., Soerono, A. N., & Mulyasari, W. (2018). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Rohida, L. (2018). Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia*, 6(1), 114–136.
- Saputra, F., Rahayu, S., & Yudi. (2020). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(4), 268–279.
- Satriawan, G. M. I., & Dewi, G. A. K. R. S. (2020). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2).
- Siaran pers BPK. (2021). *Penyerahan LHP atas LKPD TA 2021 kepada empat Pemerintah Daerah*. Berita Acara Siaran Pers BPK.
- Siregar, L., Taufik, T., & Julita, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 49–59.
- Sougi, T., Rahayu, S., & Machpuddin, A. (2018). Analisis Temuan Pemeriksaan BPK-RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*, (14), 63-65
- Swastika, I. B. P. J., & Widhiyani, N. L. S. (2020). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2724–2736.
- Trisnawati, N. N., & Wiratmaja, D. N. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 768–792. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p29>
- Zulfahmi, Hendriani, S., & Pailis, E. A. (2020). Pengaruh Penempatan Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai BPKAD Provinsi Riau Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(2). <https://doi.org/10.37859/jae.v10i2.2027>